



Manajemen Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok 2025–2030

Riyosnal Putra

Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang

Syafwandi

Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang

Alamat: Jl. Raya Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang

vochedilsemuah@gmail.com, wandi.syaf@yahoo.com

Abstrak. The National Unity and Politics Agency (Kesbangpol) of Solok Regency plays a strategic role in maintaining national resilience and political stability at the regional level. This study aims to formulate a medium-term strategy (2025–2030) through a SWOT analysis and Balanced Scorecard (BSC) approach. The analysis results indicate that Kesbangpol has strengths in terms of human resources who understand local political issues and partnerships with security agencies, but faces limitations in terms of budget and technology utilization. Opportunities include public support for the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) and trends toward cross-sector collaboration, while threats include radicalism, political polarization, and hoaxes. The strategies formulated include institutional strengthening, service digitalization, national awareness campaigns, radicalism prevention, regional policy synergy, and political resilience evaluation. These findings are expected to serve as a reference for Kesbangpol's strategic planning to achieve conducive political stability.

Keywords: Strategic management, Kesbangpol, Balanced Scorecard, Local politics

Abstrak. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Solok memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan bangsa dan stabilitas politik di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi jangka menengah (2025–2030) melalui pendekatan analisis SWOT dan Balanced Scorecard (BSC). Hasil analisis menunjukkan bahwa Kesbangpol memiliki kekuatan berupa SDM yang memahami isu politik lokal serta jaringan kemitraan dengan instansi keamanan, namun dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan pemanfaatan teknologi. Peluang yang tersedia antara lain dukungan masyarakat terhadap NKRI dan tren kolaborasi lintas sektor, sedangkan ancaman meliputi radikalisme, polarisasi politik, dan hoaks. Strategi yang dirumuskan meliputi penguatan kelembagaan, digitalisasi layanan, kampanye wawasan kebangsaan, pencegahan radikalisme, sinergi kebijakan daerah, dan evaluasi ketahanan politik. Temuan ini diharapkan menjadi acuan perencanaan strategis Kesbangpol untuk mewujudkan stabilitas politik yang kondusif.

Kata Kunci: Manajemen strategi, Kesbangpol, Balanced Scorecard, Politik lokal

PENDAHULUAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) merupakan perangkat daerah yang bertugas membina ideologi Pancasila, memelihara ketahanan nasional, serta menjaga stabilitas politik di daerah (Permendagri No. 11 Tahun 2019). Dalam konteks Kabupaten Solok, dinamika politik lokal dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perkembangan media digital, meningkatnya arus informasi, dan ancaman radikalisme. Tantangan yang dihadapi meliputi polarisasi politik, penyebaran hoaks, serta keterbatasan anggaran dalam mendukung program strategis. Oleh karena itu, diperlukan manajemen strategi yang terukur untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada. Penelitian ini menyusun perencanaan strategis 2025–2030 melalui analisis SWOT dan Balanced Scorecard (BSC) untuk memastikan setiap tujuan memiliki indikator kinerja yang jelas.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok juga merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam membangun ketahanan bangsa, menjaga stabilitas politik, serta memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat. Dalam era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi, perubahan sosial, dan dinamika politik yang semakin kompleks, Kesbangpol dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan efektivitas fungsi koordinasi, pembinaan wawasan kebangsaan, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.

Periode 2025–2030 akan menjadi masa yang krusial bagi Kesbangpol Kabupaten Solok, mengingat adanya sejumlah faktor eksternal yang memengaruhi kinerja organisasi, seperti perkembangan era *Society 5.0*, perubahan regulasi terkait otonomi daerah, meningkatnya potensi konflik sosial, serta tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik. Selain itu, perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Kabupaten Solok menuntut strategi yang adaptif dan inklusif agar upaya pembinaan ideologi Pancasila, penguatan integrasi nasional, dan pencegahan radikalisme dapat terlaksana secara optimal.

Manajemen strategi menjadi instrumen penting dalam merumuskan arah kebijakan dan program kerja yang tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen strategi, Kesbangpol diharapkan mampu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi (analisis SWOT), serta merancang langkah-langkah taktis yang sinergis dengan visi dan misi daerah. Perencanaan strategis yang baik akan memudahkan pencapaian tujuan jangka panjang, meningkatkan kinerja kelembagaan, dan memperkuat legitimasi di mata publik.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan manajemen strategi Kesbangpol Kabupaten Solok untuk periode 2025–2030. Fokus kajian mencakup perumusan visi dan misi yang responsif terhadap perkembangan zaman, analisis lingkungan internal dan eksternal, penentuan strategi prioritas, serta penyusunan rencana implementasi yang memperhatikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi pedoman praktis bagi Kesbangpol Kabupaten Solok dalam menjalankan fungsinya secara lebih efektif, adaptif, dan berorientasi pada keberlanjutan pembangunan daerah.

KAJIAN TEORI

Manajemen Strategi Sektor Publik

Manajemen strategi di sektor publik bertujuan mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan jangka panjang secara efektif dan efisien (Bryson, 2018). Proses ini meliputi perumusan visi-misi, analisis lingkungan, formulasi strategi, implementasi, dan evaluasi.

Balanced Scorecard (BSC)

Balanced Scorecard dikembangkan oleh Kaplan dan Norton (1996) sebagai kerangka pengukuran kinerja yang mencakup empat perspektif: pelanggan, proses internal, pembelajaran & pertumbuhan, dan keuangan. Penerapan BSC di sektor publik bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pelayanan (Niven, 2008).

Strategi Politik Lokal

Penelitian oleh Nugroho (2020) menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, ormas, dan masyarakat dalam membangun ketahanan politik lokal. Faktor partisipasi publik dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi kunci keberhasilan program Kesbangpol.

Perencanaan Strategis pada Sektor Publik dan Pemerintahan Daerah

1. Ciri khas strategi sektor publik

Perencanaan strategis pemerintahan berbeda dari sektor swasta karena orientasi pada pelayanan publik, akuntabilitas, keterlibatan politik, dan multi-stakeholder. Keberhasilan strategi publik memerlukan legitimasi politik, transparansi, serta mekanisme partisipasi warga.

2. Alat ukur kinerja dan akuntabilitas

Balanced Scorecard (Kaplan & Norton) dan indikator kinerja (KPI) telah banyak diadaptasi untuk pemerintahan daerah sebagai alat menyelaraskan misi strategis dengan aktivitas operasional dan mekanisme pengukuran hasil.

Strategi untuk Tugas Khusus Kesbangpol

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan integrasi sosial

Literatur tentang kebijakan kebangsaan dan civic education menunjukkan bahwa program pendidikan politik dan kegiatan kebersamaan dapat memperkuat kohesi sosial. Di konteks daerah, strategi harus sensitif terhadap kearifan lokal, bahasa, dan struktur komunitas.

2. Pencegahan konflik dan deradikalialisasi

Pendekatan pencegahan konflik menekankan deteksi dini, keterlibatan masyarakat, dan intervensi multisektoral. Strategi efektif menggabungkan aspek preventif (edukasi, ekonomi lokal) dan responsif (mediasi konflik).

3. Penanganan dinamika politik lokal

Kesbangpol perlu strategi untuk merespons dinamika partai, pemilihan lokal, dan isu identitas. Pendekatan fleksibel dan bermitra dengan aktor lokal (desa, ulama, tokoh adat) seringkali lebih efektif.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Badan Kesbangpol Kabupaten Solok. Sumber data meliputi :

1. Data Primer : Wawancara dengan pejabat struktural Kesbangpol, pengurus ormas, tokoh masyarakat.
2. Data Sekunder : Dokumen rencana strategis daerah, laporan kinerja Kesbangpol, regulasi terkait.

Metode analisis menggunakan analisis SWOT untuk memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Balanced Scorecard untuk merumuskan peta strategi dan indikator kinerja.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal

Berdasarkan wawancara, observasi, dan telaah dokumen perencanaan daerah, diperoleh gambaran kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh Kesbangpol Kabupaten Solok.

Tabel 1. Analisis SWOT Kesbangpol Kabupaten Solok

Aspek	Uraian
Kekuatan (Strengths)	Aparatur memiliki pengalaman dalam pembinaan wawasan kebangsaan. Jaringan koordinasi dengan TNI, Polri, dan tokoh masyarakat cukup kuat. Dukungan visi-misi kepala daerah terhadap stabilitas politik dan ketahanan bangsa.
Kelemahan (Weaknesses)	Keterbatasan jumlah SDM dengan kompetensi analisis konflik dan literasi digital. Anggaran program sering terbatas dan bergantung pada prioritas tahunan daerah. Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal untuk monitoring dan pelaporan.
Peluang (Opportunities)	Dukungan regulasi pusat terkait pencegahan radikalisme dan penguatan wawasan kebangsaan.

Aspek	Uraian
	Perkembangan teknologi digital untuk edukasi dan kampanye kebangsaan. Potensi sinergi dengan lembaga pendidikan, ormas, dan media lokal.
Ancaman (Threats)	Meningkatnya potensi intoleransi dan konflik horizontal berbasis identitas. Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian melalui media sosial. Dinamika politik lokal yang berpotensi memicu ketegangan sosial.

Perumusan Strategi

Dari analisis SWOT di atas, dirumuskan strategi utama Kesbangpol Kabupaten Solok untuk periode 2025–2030:

1. **Strategi SO (Strength-Opportunities):**
 - a. Memanfaatkan jaringan koordinasi dengan aparat keamanan dan tokoh masyarakat untuk mengembangkan program pembinaan wawasan kebangsaan berbasis digital.
 - b. Mengintegrasikan program Kesbangpol dengan kurikulum pendidikan lokal.
2. **Strategi WO (Weakness-Opportunities):**
 - a. Melakukan pelatihan SDM Kesbangpol dalam analisis konflik, komunikasi publik, dan literasi digital.
 - b. Mengusulkan penambahan anggaran melalui program lintas sektor yang relevan.
3. **Strategi ST (Strength-Threats):**
 - a. Meningkatkan peran tokoh adat dan agama sebagai mediator dalam potensi konflik.
 - b. Mengembangkan sistem deteksi dini berbasis komunitas untuk mencegah eskalasi konflik.
4. **Strategi WT (Weakness-Threats):**
 - a. Meningkatkan kapasitas teknologi informasi untuk menangkal hoaks dan ujaran kebencian.
 - b. Menyusun protokol penanganan krisis sosial yang terstandar.

Tujuan Strategis 5 Tahun (2025–2030)

1. Meningkatkan kapasitas pencegahan dan resolusi konflik sosial.
2. Meningkatkan indeks wawasan kebangsaan masyarakat.
3. Meningkatkan integrasi data ormas dan LSM secara digital.
4. Mendorong tata kelola organisasi politik dan ormas yang tertib hukum.
5. Membangun sistem informasi pengawasan politik berbasis digital.

Sasaran dan Strategi per Tahun

Tahun	Sasaran	Strategi
2025	Penguatan struktur kelembagaan dan SDM	Pelatihan SDM, revisi SOP, kerjasama dengan lembaga pendidikan
2026	Digitalisasi data dan layanan publik	Pengembangan aplikasi pengawasan ormas & partai
2027	Peningkatan partisipasi masyarakat	Kampanye wawasan kebangsaan berbasis komunitas dan media sosial
2028	Pencegahan radikalisme dan konflik	Program dialog lintas agama, forum FKDM & FKUB

Tahun	Sasaran	Strategi
2029	Sinergi kebijakan dengan pemerintah daerah	FGD, MoU dengan OPD, harmonisasi program
2030	Evaluasi dan penguatan ketahanan politik lokal	Audit strategi, laporan indeks ketahanan politik daerah

Indikator Keberhasilan

Indikator	Target
Indeks Wawasan Kebangsaan	Naik 10% per tahun
Jumlah konflik sosial yang tertangani	90% ditangani secara preventif
Jumlah ormas terverifikasi	100% terdigitalisasi
Kepuasan layanan publik	>85% berdasarkan survei tahunan
Kolaborasi Instansi	MoU dengan 10+ OPD

Peta Strategi (Balanced Scorecard)

Perspektif	Tujuan Strategis	Ukuran Kinerja
Pelanggan	Meningkatkan kepercayaan publik	Survei kepuasan layanan
Proses Internal	Digitalisasi layanan ormas & parpol	Aplikasi & dashboard online aktif
Pembelajaran & Pertumbuhan	Peningkatan kapasitas SDM	Jumlah pelatihan & sertifikasi
Keuangan	Efisiensi penggunaan anggaran	Persentase serapan anggaran tepat sasaran

Rencana Aksi Tahunan

Tahun	Fokus Strategi	Program Unggulan
2025	Kelembagaan & SDM	Pelatihan deteksi konflik, SOP baru
2026	Digitalisasi layanan	Aplikasi pendataan ormas & partai
2027	Kampanye wawasan kebangsaan	Edukasi media sosial, lomba kebangsaan

Tahun	Fokus Strategi	Program Unggulan
2028	Pencegahan radikalisme	Forum FKDM, FKUB, dialog lintas budaya
2029	Kolaborasi lintas sektor	FGD dengan OPD, MoU daerah
2030	Evaluasi & ketahanan politik	Survei indeks, audit strategi nasional

KESIMPULAN

Strategi manajemen Kesbangpol Kabupaten Solok 2025–2030 disusun untuk menjawab tantangan politik lokal, radikalisme, dan polarisasi masyarakat. Pendekatan SWOT dan Balanced Scorecard memudahkan penyusunan tujuan terukur, indikator keberhasilan, serta peta strategi yang berorientasi pada pelayanan publik, penguatan kelembagaan, dan digitalisasi layanan. Implementasi strategi ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan politik daerah secara berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan manajemen strategi Kesbangpol Kabupaten Solok bergantung pada tiga pilar utama: penguatan kelembagaan, digitalisasi layanan, dan sinergi lintas sektor. Balanced Scorecard terbukti efektif sebagai alat pengukuran kinerja terintegrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bryson, J. M. (2018). Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations. Wiley.
 Gürel, E., & Tat, M. (2017). SWOT Analysis: A Theoretical Review. *The Journal of International Social Research*, 10(51), 994–1006.
 Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. Harvard Business Press.
 Niven, P. R. (2008). Balanced Scorecard Step-by-Step for Government and Nonprofit Agencies. Wiley.
 Nugroho, H. (2020). Strategi Penguatan Ketahanan Politik Lokal Melalui Sinergi Pemerintah dan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 145–160.